



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOFYAN SJAF
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 869686

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.970.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1.445 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 5.115 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 1.800.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **369.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI KAWASAKI KLX 150 G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 110 D Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **133.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **681.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 6.153.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.153.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.